

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kelas umum yang dikenal dengan istilah inklusif telah menjadi trend di banyak negara selama lebih dari 20 tahun terakhir, khususnya setelah Pernyataan Salamanca pada tahun 1994. Sebagai landasan filosofis untuk memberikan kesetaraan akses untuk semua peserta didik, pendidikan inklusif mengubah lingkungan sekolah yang dibatasi menjadi lingkungan yang lebih ramah dan dapat diakses untuk keberagaman siswa (Dede Supriyanto, 2019).

Khusus di Indonesia, penerapan sistem pendidikan inklusif merupakan salah satu cara untuk memenuhi wajib belajar sembilan tahun melalui pendidikan yang berkualitas. Melalui sistem pendidikan inklusif, pemerintah membuka akses pendidikan bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial serta anak yang memiliki kecerdasan dan bakat khusus (Bahrudin et al., 2020).

Pendidikan inklusif memungkinkan semua peserta didik berkesempatan untuk belajar serta berpartisipasi dalam kelas yang memberikan mereka tantangan dan kesuksesan (Mackey, 2014). Pada prinsipnya sistem ini menuntut agar semua anak berkebutuhan khusus terlepas dari tingkat dan jenis kebutuhannya harus dididik di kelas secara penuh pada sekolah terdekat bersama dengan teman sebayanya yang normal tanpa memandang keterbatasan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Smith menyatakan keunggulan model inklusif adalah kemudahan dalam mengakses kurikulum umum, inklusi dapat menghasilkan keuntungan akademis dan sosial, persiapan yang lebih baik untuk kehidupan bermasyarakat, dan terhindar dari efek negatif yang disebabkan oleh eksklusifitas (Hicks-Monroe, 2011). Keuntungan dari pendidikan inklusif adalah anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat

terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Sekolah umum dengan orientasi inklusif melawan diskriminasi, menciptakan komunitas terbuka dan membantu mengembangkan masyarakat inklusif. Setiap anak memiliki karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang spesifik, pendekatan dalam penanganan harus pada kekuatan atau kelebihan anak daripada kekurangannya (Galaterou, 2017). Pendidikan inklusif artinya semua peserta didik yang bersekolah terlepas dari kelebihan atau kekurangannya menjadi bagian dari sekolah tersebut (Holmberg dan Jeyaprabathaban, 2016).

Pendidikan inklusif adalah proses penyesuaian lingkungan rumah, sekolah, dan komunitas yang lebih luas untuk menampung anak berkebutuhan khusus, (Okongo, Ngao, Rop, dan Nyonges, 2015). Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik berdasarkan hasil identifikasi, manajemen, penilaian dan hasil laporan, pemberdayaan tenaga pendidikan, pemberdayaan masyarakat.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusif, Dengan Menyelenggarakan dan Mengembangkan disetiap kabupaten/kota sekurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Surat edaran tersebut mengisyaratkan pentingnya alternatif untuk memenuhi hak pendidikan untuk semua. Pada tanggal 8 – 14 Agustus 2004 peserta Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif mengeluarkan beberapa butir pernyataan atau himbauan untuk menjadikan pendidikan menuju inklusi atau lebih dikenal dengan nama Deklarasi Bandung 2004.

Untuk merespon Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan

Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 105/2003 dan Nomor: 34/2003, tentang Penunjukan Sekolah Perintis Pendidikan Inklusi di lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 116 tahun 2007 adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan dalam mencapai masyarakat yang demokratis; untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan; dan untuk memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Sampai tahun 2012, di DKI Jakarta tercatat 200 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah tersebut tersebar di seluruh Kota Administrasi di Jakarta dan mencakup semua jenjang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif, secara umum saat ini terdapat lima permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat pendidikan inklusif, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan system dukungan (Sudjak, 2018). Pendidikan inklusif yang diselenggarakan di sekolah reguler sangat memerlukan sistem dukungan agar dapat berjalan dengan baik, salah satu sistem dukungan yang dapat dilakukan adalah dengan program pusat sumber pendidikan inklusif pada sekolah luar biasa.

Dalam rangka kelancaran pemberian pelayanan pendidikan bagi siswa yang berkelainan/berkebutuhan khusus dan bimbingan bagi guru sekolah inklusif agar mampu memberikan layanan pendidikan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menyiapkan program untuk membantu sekolah-sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif dengan memanfaatkan sekolah luar biasa sebagai pusat sumber (*resource center*). Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 273/2012 Tentang Penunjukkan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Provinsi DKI Jakarta.

Banyaknya istilah pusat sumber yang digunakan, untuk membedakan dengan pusat sumber lain pada program pusat sumber untuk pendidikan inklusif ini disebut pusat sumber pendidikan inklusif. Pusat sumber (*resource center*) pendidikan inklusif merupakan program dalam rangka pengembangan pendidikan inklusif. Pusat sumber dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK), orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi, mendapatkan pelatihan berbagai keterampilan, memperoleh berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pusat sumber memainkan peran penting dalam pengembangan profesional guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, (Gedfie dan Negassa, 2019). Sedangkan menurut Amuda (2009) bahwa pusat sumber adalah sebuah program pada lembaga untuk memberikan bantuan kepada orang-orang berkebutuhan khusus, guru-guru umum, orang tua, dinas pendidikan dsb, yang melatih dan menempatkan orang berkebutuhan khusus; yang mengadakan penelaahan terhadap berbagai kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan pusat sumber sebagai suatu program yang dilakukan oleh lembaga yang menyediakan informasi, peralatan, dan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Pusat sumber adalah suatu program yang berfungsi memberikan layanan pendukung atau pendampingan terhadap sekolah-sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif baik secara teknis maupun konsultatif (Hidayat, 2013).

Layanan dukungan atau pendampingan ini untuk mempermudah dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif sehingga terjadi keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pusat sumber diharapkan untuk mengasumsikan peran ganda, termasuk: administrasi pendidikan, pelatihan guru dan mengajar penelitian; konsultasi dan penyediaan media dan alat bantu pengajaran (Ming Liu, 2016).

Program ini memfungsikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri atau Swasta yang sudah ada dan memenuhi syarat untuk dipersiapkan melaksanakan program pusat sumber, sehingga mampu melaksanakan fungsi dan sebagai sistem

dukungan atau pendampingan bagi sekolah-sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Dalam program pusat sumber, guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sangat bergantung pada dukungan tim kepada sekolah mereka untuk konsultasi, pembentukan rencana pembelajaran individual, dan penyederhanaan materi, serta mendapatkan pemahaman tentang pendidikan inklusif (Lapham dan Papikyan, 2012). Program pusat sumber menawarkan dukungan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, serta dukungan teknis dan pengembangan profesional guru penyelenggara pendidikan inklusif (Kwazulu Natal Departemen of Education, 2010), serta guru pendidikan khusus dan kepala sekolah luar biasa dapat mentransfer keahlian mereka, serta dalam pendekatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus ke guru-guru di sekolah umum (*Organisation of Provision to Support Inclusive Education Flensburg*, 2013). Sehingga guru-guru umum dapat memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara mandiri.

Sekolah Luar Biasa di DKI Jakarta berjumlah 89 sekolah dengan berbagai kekhususan atau spesialisasi. Dalam rangka kelancaran pemberian pelayanan pendidikan inklusif pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif maka Sekolah Luar Biasa tersebut ditunjuk sebanyak 21 SLB untuk menjadi pusat sumber penyelenggaraan pendidikan khusus.

Namun, dalam pelaksanaan fungsinya, diperoleh informasi dari guru dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang menjadi mitra pusat sumber (*resource center*) bahwa masih terdapat kendala dan permasalahan yang dialami, seperti: jadwal yang tidak menentu, guru pendidikan khusus dari sekolah luar biasa penyelenggara program pusat sumber yang semakin berkurang intensitasnya untuk menangani anak berkebutuhan khusus dan pembimbingan terhadap guru dalam melayani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Setelah 5 (lima) tahun dikeluarkannya surat keputusan penunjukkan pusat sumber pendidikan inklusif, belum dilakukan evaluasi secara khusus dan menyeluruh untuk mengetahui kendala dan efektifitas pusat sumber sebagai pendukung teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Efektifitas penyelenggaraan program pusat sumber pendidikan inklusif dapat diketahui melalui evaluasi terhadap semua aspek pendukung pelaksanaan

program pusat sumber pendidikan inklusif. Evaluasi adalah proses menentukan sejauh mana tujuan tercapai dan tidak hanya berkaitan dengan penilaian pencapaian tetapi juga dengan peningkatan mutu, (Aziz, Mahmud, dan Rehman, 2018).

Evaluasi program pusat sumber pendidikan inklusif ini dilakukan terhadap komponen yang terlibat langsung dalam program, misalnya: ketenagaan, sarana prasarana, perangkat layanan pendidikan, dan proses layanan pendidikan, sedangkan komponen yang tidak terlibat secara langsung mencakup kontribusi yang diberikan masyarakat di luar penyelenggaraan program, misalnya: kontribusi komite sekolah, orangtua, dan tenaga disiplin ilmu yang lain, sehingga dapat diketahui hambatan, manfaat dan dampak penyelenggaraan program pusat sumber pendidikan inklusif serta berbagai informasi penting yang bermanfaat bagi penyelenggaraan program masa datang.

Negara dengan pengalaman terpanjang memiliki program pusat sumber pendidikan inklusif adalah Swedia. Meskipun *Tomtebodas School for the Blind* tutup pada 1986, mereka lanjut bertahan sebagai pusat sumber pendidikan inklusif yang mendukung anak dan remaja dengan keterbatasan penglihatan (*A Comenius I School Development Project*, 2003). Selain itu berbagai Negara memiliki program pusat sumber pendidikan inklusif pada sekolah luar biasa, seperti: Armenia, India, Afrika Selatan, dan lain sebagainya.

Namun, pelaksanaan program pusat sumber diberbagai negara tidak luput dari permasalahan. Di Afrika Selatan, Banyak pendidik di sekolah luar biasa saat ini tidak memiliki kualifikasi guru, tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan program pusat sumber, dan permasalahan lainnya (Kwazulu Natal Departemen of Education, 2010). Sedangkan di Armenia permasalahan yang dihadapi kurangnya kemampuan dan kemauan guru pendidikan khusus untuk memberikan pelatihan dan konsultasi kepada para guru penyelenggara pendidikan inklusif (Lapham dan Papikyan, 2012).

Sebagai sebuah program pendukung berfungsinya layanan pendidikan inklusif, keberadaan program pusat sumber pendidikan inklusif di Jakarta ini sangat perlu dievaluasi penyelenggaraannya. Data yang aktual secara kualitatif maupun

kuantitatif dapat dijadikan dasar dalam menetapkan langkah perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan program pusat sumber pendidikan inklusif.

Adapun model evaluasi program yang digunakan untuk mengevaluasi program Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yaitu model *Context, Input, Procces, Product* (CIPP) dari Stufflebeam. Dalam penelitian ini, evaluasi dengan model CIPP agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu: tahap konteks, input, proses dan produk. Model CIPP ini merupakan model evaluasi yang cenderung atau banyak digunakan dalam mengevaluasi suatu program dari sisi manajemen. Secara khusus, komponen evaluasi *context*, dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran penyedia layanan dan kebutuhan masyarakat. Komponen *input* kemudian dapat membantu mereseapkan proyek responsif yang dapat menjawab kebutuhan yang diidentifikasi dengan baik. Selanjutnya, komponen evaluasi *procces* memantau proses proyek dan hambatan prosedural potensial, dan mengidentifikasi kebutuhan untuk penyesuaian proyek. Akhirnya, komponen evaluasi *product* mengukur, menginterpretasikan, dan menilai hasil proyek dan menginterpretasikan kelebihan, nilai, signifikansi, dan kejujuran mereka (Zhang et. al., 2011).

Pada penelitian ini ditambah dengan komponen *Outcome* sehingga menjadi CIPPO. Penambahan komponen *Outcome* atau dampak ini untuk melihat bagaimana dampak program pusat sumber terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. *Outcome* bukan aktivitas atau program itu sendiri, melainkan dampak langsung yang dirasakan peserta baik berupa perubahan tingkat pemikiran, sikap, perbuatan maupun prestasi lebih tinggi. Model CIPPO saat ini masih dianggap model yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengevaluasi suatu program yang telah berlangsung lama dan model evaluasi yang memandang bahwa program yang dievaluasi sebagai suatu sistem.

Untuk menguatkan evaluasi model CIPPO yang lebih ke arah manajemen, peneliti juga menggunakan model tambahan lainnya yaitu evaluasi Model Hammond. Evaluasi Model Hammond melihat efektifitas program pusat sumber sebagai suatu proses pendidikan kemudian karakteristik modifikasi yang terdapat pada model kubus EPIC dari Hammond dimasukkan ke dalam tahap model

CIPPO. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian evaluasi program pusat sumber pendidikan inklusif yang ada di DKI Jakarta.

B. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program pusat sumber sebagai pendukung pendidikan inklusif di DKI Jakarta. Program Pusat Sumber Pendidikan Inklusif merupakan suatu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan layanan pendukung bagi sekolah-sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif baik secara teknis maupun konsultatif. Berdadarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Pusat sumber pendidikan inklusif yang akan dievaluasi secara kuantitatif berjumlah 21 SLB sedangkan secara kualitatif dibatasi pada Pusat Sumber SLBN 04, SLB Rawinala, SLB Budi Waluyo, SLB Pelita Hati dan Yayasan Mitra Netra. Pusat sumber tersebut mewakili jenis pusat sumber dan wilayah.
2. Dalam penelitian evaluatif ini, terdapat sejumlah komponen yang perlu diamati sebagai salah satu bahan untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program pusat sumber sebagai pendukung pendidikan inklusif pada sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai pusat sumber dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta. Komponen tersebut mencakup di dalamnya *Context*, *Input*, *Process*, *product*, dan *Outcome* dan memadukan dengan komponen *instructional*, *institutional* dan *behavior* Model Hammond.
3. Komponen *Context*, dibatasi dalam mengungkap regulasi yang memayungi pelaksanaan program, analisis kebutuhan, dan kesesuaian antara tujuan dengan sasaran program pusat sumber pendidikan inklusif.
4. Komponen *Input*, dibatasi pada dalam mengungkapkan kesiapan-kesiapan penyelenggara program dalam aspek; Guru pendidikan Khusus dalam menjalankan program, rencana kerja, sarana dan prasarana, kecukupan dan kemanfaatan dana, serta kelengkapan administrasi (kelembagaan).

5. Komponen *Process*, dibatasi pada pemahaman dan sikap guru pembimbing khusus (GPK) terhadap tugas dan fungsi pusat sumber pendidikan inklusif, pelaksanaan rencana kerja, dan monitoring dan evaluasi.
6. Komponen *Product*, dibatasi pada pemahaman dan sikap guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terhadap pendidikan inklusif.
7. Komponen *Outcome*, dibatasi pada keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh guru kelas di sekolah inklusif yang terdiri dari; perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan penelitian di atas, pelaksanaan pusat sumber sebagai pendukung pendidikan inklusif terdiri dari beberapa komponen, yaitu: komponen konteks, input, proses, hasil dan dampak. Rincian komponen tersebut adalah:

1. *Context*

- a. Bagaimanakah regulasi program pusat sumber pendidikan inklusif?
- b. Bagaimana analisis kebutuhan program pusat sumber pendidikan inklusif?
- c. Apakah ada kesesuaian antara tujuan dengan sasaran program pusat sumber pendidikan inklusif?

2. *Input*

- a. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia (Guru pendidikan Khusus) ?
- b. Bagaimana kesiapan rencana kerja program pusat sumber pendidikan inklusif?
- c. Bagaimana kesiapan sarana prasarana (fasilitas)?
- d. Bagaimana kesiapan kecukupan dan pemanfaatan dana ?
- e. Bagaimana kesiapan kelengkapan administrasi (kelembagaan)?

3. *Process*

- a. Bagaimana pemahaman guru pembimbing khusus (GPK) terhadap tugas dan fungsi pusat sumber pendidikan inklusif?

- b. Bagaimana sikap guru pembimbing khusus (GPK) terhadap pusat sumber pendidikan inklusif?
- c. Bagaimana pelaksanaan program pusat sumber pendidikan inklusif?
- d. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi. program?

4. *Product*

- a. Bagaimana pemahaman guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terhadap pendidikan inklusif?
- b. Bagaimana sikap guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terhadap pendidikan inklusif?

5. *Outcome*

- a. Bagaimanakah keterampilan guru kelas di sekolah inklusif dalam perencanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh?
- b. Bagaimanakah keterampilan guru kelas di sekolah inklusif dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh?
- c. Bagaimanakah keterampilan guru kelas di sekolah inklusif dalam evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan program pusat sumber pada sekolah luar biasa yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya tentang pelaksanaan program pusat sumber pendidikan inklusif. Hasil penelitian juga dapat berguna bagi pengembangan pusat sumber pendidikan inklusif baik secara teoretis maupun praktis. Sebagai kegiatan ilmiah yang menghasilkan data dari berbagai aspek yang dievaluasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap program pusat sumber sebagai pendukung pendidikan inklusif.

Secara praktis evaluasi pelaksanaan program pusat sumber sebagai pendukung pendidikan inklusif bermanfaat untuk perbaikan program maupun untuk perbaikan kebijakan, kesesuaian antara *input*, efektifitas *process*, maupun ketercapaian tujuan *product* serta *outcomes* (dampak) dari proses dan kinerja pusat sumber sebagai pendukung pendidikan inklusif.

E. Keterbaruan Penelitian (*State of the Art*)

Dalam rangka kelancaran pemberian pelayanan pendidikan bagi siswa yang berkelainan/berkebutuhan khusus dan bimbingan bagi guru sekolah inklusif agar mampu memberikan layanan pendidikan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus perlu adanya program sistem dukungan untuk membantu sekolah-sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif dengan memanfaatkan sekolah luar biasa sebagai pusat sumber (*resource center*). Program Pusat sumber atau *resource center* telah berkembang diberbagai negara dan telah dilakukan penelitian mengenai keberadaan dan pengembangan program tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan program pusat sumber pendidikan inklusif yang pernah dilakukan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah: Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Rahman menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Adapun yang menjadi responden atau sumber data adalah kepala sekolah, guru, pengurus komite sekolah dan staf tata usaha. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, antara lain: proses perubahan organisasi di SLBN Citeureup lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal sekolah; strategi perubahan organisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah cenderung belum didukung oleh sumber daya sekolah misalnya keterampilan yang dimiliki SDM, kejelasan dalam penataan tugas, peran serta tanggung jawab setiap personel sekolah serta perekayaasaan media sarana pendukung; dan implementasi peranan kepemimpinan kepala sekolah menunjukkan masih ada kelemahan dalam pengembangan arah sekolah dalam jangka panjang sehingga

membuat warga sekolah kebingungan mengenai apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan program pusat sumber.

Penelitian yang dilakukan oleh Mebrat Gedfie dan Dawit Negassa di sekolah dasar Ethiopia, bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi *cluster resource centre* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif anak berkebutuhan pendidikan khusus, dan lebih khusus lagi anak tunanetra. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pusat sumber tidak berjalan secara memadai dalam mendukung pendidikan anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus karena hambatan terkait keuangan, sikap, materi dan tenaga terlatih. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti alokasi dana yang cukup, pelatihan peningkatan kesadaran tentang isu-isu inklusi seperti pelatihan keterampilan dan kerja sama antar pemangku kepentingan perlu dilakukan oleh sekolah dan dinas pendidikan (Gedfie dan Negassa, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Lapham dan Papiqyan (2012) di Armenia ini, berfokus pada dukungan inklusi oleh para pembuat kebijakan. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi pelatihan dan kurikulum di sekolah-sekolah, serta dukungan dan sikap dari para pemangku kepentingan terhadap pendidikan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga meneliti bagaimana sekolah khusus dapat bertindak sebagai pusat sumber pendidikan inklusif di Armenia. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur dengan kepala sekolah, pejabat kementerian, dan perwakilan dari LSM. Sesi diskusi kelompok dilakukan dengan guru, spesialis, orang tua, dan siswa di sekolah khusus dan inklusif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah umum dan menghormati hak mereka untuk berada di antara rekan-rekan mereka. Sekolah khusus sebagai pusat sumber untuk pendidikan inklusif, dukungan kerja dengan guru, orang tua, dan masyarakat. Ini juga akan menjadi penting untuk terus memberikan kesempatan pengembangan profesional bagi staf sekolah khusus karena mereka terus bertindak sebagai sumber daya untuk orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Ishida Banda, Moyo, dan Mgogo dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner ini menunjukkan bahwa ada beberapa contoh praktik yang baik yang dihasilkan oleh guru pendidikan khusus dengan anak berkebutuhan khusus; Praktik informatif ini perlu dibagikan dan diuji untuk mengembangkan model interpretasi yang lebih baik dan implementasi kebijakan di tingkat sekolah dengan menghubungkan pendekatan *top-down dan bottom-up* (Ishida Banda, Moyo, dan Mgogo, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Mbulaheni O Maguvhe (2013), mengumpulkan persepsi guru di sekolah untuk tunanetra tentang peran sekolah luar biasa sebagai pusat sumber. Metode dilakukan dengan penelitian kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa guru membutuhkan lebih banyak pelatihan berkelanjutan. Ada kebutuhan akan lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Ada juga kebutuhan untuk berubah peraturan yang mengatur peran guru di sekolah luar biasa sehubungan dengan tugas atau tanggung jawab baru mereka. Guru juga menginginkan status atau pengakuan yang terkait dengan peningkatan remunerasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jan Siska, Yirgashewa Bekele, Julie Beadle-Brown and Jan Zahorik (2018) menggunakan metode mixed method antara survey dan wawancara dengan data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan mengenai sikap terhadap anak berkebutuhan khusus, pemahaman tentang pendidikan inklusif, dukungan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan Peranan staf pendidikan adalah mendukung keberlanjutan sekolah inklusif.

Penelitian ini dilakukan oleh Michelle Somerton, et al, mengkaji pengalaman kolaboratif stakeholder di sekolah-sekolah yang didukung oleh pusat sumber. Hasilnya, terdapat kesempatan yang lebih baik seperti aturan dan bimbingan yang secara langsung relevan dengan budaya dan konteks local; hasil dari penelitian ini juga menyatakan meskipun dalam praktiknya dinyatakan inklusif, tapi masih butuh pengembangan yang diadopsi dari organisasi lokal dan sekolah-sekolah. Hal yang perlu digarisbawahi dalam

penelitian ini adalah kurangnya perkembangan profesional dan berbagai kebutuhan serta guru yang terlatih sangat diperlukan sehingga bisa bekerja dengan efektif dan kolaboratif. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi perhatian adalah tanpa adanya konsultasi terhadap perkembangan aturan atau penanaman anak berkebutuhan khusus hasilnya menjadi tidak efektif atau bahkan buruk.

Penelitian yang dilakukan oleh Sifiso Emmanuel Mbelu (2011) mengungkapkan tantangan berikut yang menghambat implementasi; Sikap negatif beberapa pendidik dan orang tua terhadap inklusi, kurangnya Program Pengembangan Keterampilan untuk pendidik, keterlibatan orang tua yang minim serta kurangnya pembangunan infrastruktur.

Dari uraian hasil penelitian lain di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat persamaan dan perbedaaan dengan evaluasi program pusat sumber pendidikan inklusif yang peneliti lakukan. Ada beberapa aspek yang dapat dilihat seperti tempat penelitian, metode yang dilakukan, sumber data, dan hasil penelitian. Beberapa penelitian memiliki kesamaan dalam metode dan sumberdata namun berbeda hasil penelitian dan ruang lingkup penelitian. adapapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang relevan terdahulu, yaitu dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih kompresehensif dari penelitian lainnya dengan kombinasi model evaluasi anatar *CIPPO* dan Hammond dengan focus penelitian mulai dari kebijakan, analisis kebutuhan dan sasaran, input yang dibutuhkan dalam pusat sumber, proses pelaksanaan program pusat sumber dan luaran atau dampak program.

Selain itu penelitian evaluasi program pusat sumber pendidikan inklusif di luar negeri dipengaruhi juga oleh konteks dan budaya masing-masing yang berbeda dengan kultur berbagai daerah di Indonesia.